



KONSTRUKSI IDEAL WARGA NEGARA DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: SUATU TINJAUAN LITERATUR

^{1*}Toba Sastrawan Manik, ²Ary Purwantiningsih², ³Dwi Riyanti

¹Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Indonesia

^{2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.15294/keyntc11>

Submitted : 2024-03-15. Accepted: 2024-08-14. Published 2024-08-17.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengangkat dan mendiskusikan dimensi lain yang melekat setiap bahasan tentang warga negara yaitu peran. Warga negara seyogyanya tidak hanya dilihat dalam definisi semata yakni keanggotaan dalam komunitas politik. Namun yang tidak kalah penting adalah dimensi peran warga negara. Kajian ini diangkat dari aspek pedagogis dengan studi pustaka (literature research). Kajian ini menemukan bahwa ide dasar demokrasi itu ialah keberdayaan warga negara. Keberdayaan dalam arti bahwa letak kemartabatan, keluhuran, dan kekuatan demokrasi itu terletak pada bagaimana rakyat aktif berperan. Warga negara ideal demokrasi mensyaratkan warga transformatif, kritis dan berorientasi keadilan. Pendidikan kewarganegaraan dalam pendekatan pendidikan untuk kewarganegaraan (education for citizenship) ialah suatu keniscayaan. Untuk menciptakan warga negara ideal tersebut harus melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, peneliti, perancang kurikulum, pemerintah, guru, orang tua dan siswa.

Kata kunci: Demokrasi, Kewarganegaraan, Peran warga ideal

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to raise and discuss another dimension inherent in every discussion about citizens, namely roles. Citizens should not only be seen in the definition alone, namely membership in a political community. However, what is no less important is the dimension of the role of citizens. This study is raised from a pedagogical aspect with literature research. This study found that the basic idea of democracy is citizen empowerment. Empowerment in the sense that the dignity, nobility, and strength of democracy lies in how the people actively play a role. Ideal citizens of democracy require transformative, critical and justice-oriented citizens. Civic education in the approach of education for citizenship is a necessity. To create these ideal citizens, many parties must be involved, starting from schools, researchers, curriculum designers, government, teachers, parents and students.

Keywords: Democracy, Citizenship, Role of ideal citizens

PENDAHULUAN

Perang dingin yang dianggap dimenangkan oleh ideologi liberal juga kemenangan demokrasi. Sejak saat itu demokrasi menjadi primadona semua negara. Namun demokrasi bukanlah sistem sempurna, tunggal dan tanpa kekurangan. Seperti ditegaskan oleh Bernard Crick (2008: 2) “everyone claims her but no one can possess or even name her fully.” Hal senada diungkapkan oleh Birzea (2000: 11) bahwa demokrasi mungkin untuk menjadi sempurna namun juga memiliki kontradiksi secara internal.

Menurut Castles dalam Birzea (2000: 11) setidaknya ada 9 (sembilan) kontradiksi dalam demokrasi: inklusi vs eksklusi, pasar vs negara, pertumbuhan kesejahteraan vs meningkatnya kemiskinan, jaringan vs sendiri, universal vs lokal, produksi vs lingkungan, modernitas vs postmodern, kewarganegaraan nasional vs kewarganegaraan dunia dan terakhir atas-bawah demokrasi vs bawah-atas demokrasi. Kontradiksi internal dan kemungkinan demokrasi menjadi proyek sempurna membutuhkan warga negara yang memahami dan kompeten dalam demokrasi. Osler dan Starkey (2006: 4) mengakui demokrasi secara esensial mudah rapuh dan bergantung pada keterlibatan aktif warga negara, tidak hanya dalam pemberian suara, tapi dalam pengembangan dan partisipasi secara keberlanjutan dan komunitas-komunitas kohesif. Pada akhirnya mensyaratkan pendidikan kewarganegaraan (politik) dalam membentuk warga negara demokratis secara hakiki.

Publikasi United Nations Development Program (UNDP) Tahun 2004 merilis hasil yang jadi alarm demokrasi. Dalam publikasi tersebut disebutkan 17 dari 231 pemimpin negara tidak setuju bahwa demokrasi memberikan proses signifikan selama dekade terakhir. Sebanyak 55% dari warga responden menyatakan tidak mendukung lagi demokrasi karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, dan pada saat yang sama 56% warga responden menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lebih penting daripada demokrasi

(Espinola, 2005: 6). Demokrasi perlahan kehilangan legitimasi dan kekurangan keyakinan dari masyarakat. Jika tidak diantisipasi, bukan hal mustahil demokrasi akan ditinggalkan atau “clearly the era of democratic euphoria has ended” (Issacharoff, 2018: 487).

Problematika tersebut harus diselesaikan lewat usaha sistematis dan terstruktur. Dorongan terhadap intensifikasi pendidikan politik (baca; pendidikan kewarganegaraan) sebagai upaya peningkatan kapasitas dan akseptabilitas demokrasi harus dilakukan. Sebab, demokrasi dijalankan oleh rakyat maka perbaikan kualitas demokrasi adalah mereorientasi eksistensi rakyat. Pertanyaan pentingnya adalah warga negara yang bagaimana?

Menurut Westheimer dan Kahne (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada tiga tipologi konsep warga negara yang baik terhadap demokrasi yakni bertanggungjawab secara pribadi (personally responsible), partisipatif (participatory) dan berorientasi keadilan (justice oriented). Tipologi ini menarik karena dipandang dari aspek hasil pendidikan politik di persekolahan.

Secara sederhana ditarik sebuah garis lurus antara karakteristik demokrasi, warga negara, dan pendidikan politik. Pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan mengemban misi besar untuk memperbaiki kualitas-kualitas demokrasi abad modern.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini mencoba mengkaji tentang warga negara ideal dengan cara studi literatur (literatur research).

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif jenis kajian Pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan berupa buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Data-data kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Westheimer dan Kahne adalah tidak cukup untuk berpandangan bahwa nilai-nilai demokrasi sama pentingnya prioritas akademik tradisional namun juga harus bertanya jenis nilai demokrasi apa. Politik dan ideologi apa yang ditanamkan didalam atau dilibatkan dalam konsepsi kewarganegaraan? Prioritas beragam-personal bertanggungjawab, partisipatif warga negara, dan warga negara berorientasi keadilan secara signifikan berbeda tergantung pada komitmen dan kapasitas terhadap demokrasi.

Tipologi yang dianggap sebagai warga negara baik adalah bertanggung jawab secara personal, partisipatif dan berorientasi keadilan. Ketiganya tidak bisa dibentuk sekaligus melainkan dengan pendekatan, metode dan kurikulum yang berbeda. Bertanggung secara personal artinya bertindak secara bertanggung jawab baik terhadap dirinya dan komunitasnya misalnya dengan mematuhi peraturan, mendonorkan darah. Namun tipe ini memiliki kelemahan dan dianggap belum cukup untuk merespon tantangan pendidikan sebuah demokrasi. Lagi pula, penekanan terhadap individu karakter mengaburkan inisiatif kebutuhan terhadap publik dan kolektif.

Warga negara partisipatif ialah orang/individu yang aktif/terlibat dalam urusan publik dan kehidupan sosial komunitas baik tingka lokal, regional dan nasional. Pendukung tipe kedua ini berpendapat bahwa partisipasi publik melebihi masalah atau kesempatan komunitas khusus. Hal ini juga mengembangkan hubungan, pemahaman umum, kepercayaan, dan komitmen kolektif.

Tipe yang ketiga adalah warga negara berorientasi keadilan. Pendukung warga negara berorientasi keadilan berpendapat bahwa warga negara demokrasi efektif membutuhkan kesempatan untuk menganalisis dan memahami hubungan saling terkait antara sosial, ekonomi, dan kekuatan politik. Harapan warga negara partisipatif dan warga negara berorientasi keadilan berbagi pada sebuah penekanan

kerjasama dalam hubungan dengan kehidupan dan isu-isu komunitas.

Ide Demokrasi

Ide dasar yang menginspirasi demokrasi adalah pemberdayaan manusia (Alexander dan Welzel, 2011: 285). Untuk mengukur demokrasi lanjutnya adalah bagaimana membuat demokrasi itu efektif. Ide ini yang kemudian berkembang dan direalisasikan baik dalam bentuk nilai (*values*) maupun dalam struktur pemerintahan (*government*). Demokrasi sebagai sebuah nilai ialah sebuah proyek dalam pengembangan secara terus menerus, sebuah ideal yang hendak dicita-citakan (Birzea, 2000: 11).

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan legitimasi. Namun martabat atau kemuliaan demokrasi, tidak hanya memerlukan warga negara yang bebas namun juga warga negara memiliki kemauan dan mampu bertindak sebagai warga negara yang bebas (Ober, 2012: 827). Sehingga keterlibatan (peran) warga negara itu menjadi persyaratan mutlak. Bahkan diharapkan memiliki otonomi dalam menilai perbuatannya itu apakah sudah baik atau belum. Owen (2003: 107-108) menegaskan,

“If the good or interests of everyone should be weighed equally, and if each adult person is in general the best judge of his or her good or interests, then every adult member of an association is sufficiently well qualified, taken all around, to participate in making collectively binding decisions that affect his or her good or interests, that is, to be a full citizen of the demos. More specifically, when binding decisions are made, the claims of each citizen as to the laws, rules, policies, etc. to be adopted must be counted as equal and equally valid. Moreover, no adult members are so definitively better qualified than the others that they should be entrusted with making binding collective decisions.”

Demokrasi bukan pertanyaan kebebasan apa hendak dijalankan melainkan bagaimana kebebasan dijalankan. Demokrasi mengharuskan

warga negara yang mendukung dan memahami demokrasi itu secara konsisten. Hal senada dengan kerangka kerja UNICEF (2000: 10),

“Democracy demands all citizens take part in establishing the governance and key functions in society. Excluding children and young people would mean robbing half the world’s population of the opportunity to exercise their citizenship, and the right to have their interests taken into account.”

Demokrasi menaruh harapan akan kualitas dan kapasitas warganya. Khususnya bagi generasi muda, pendidikan kewarganegaraan yang memahami apa itu dan bagaimana harusnya dalam demokrasi sangat penting. Hal ini ditegaskan oleh Patrick (1999: 1) *“diverse peoples in various parts of our worlds commonly understand that if we would ber “government of the people, by the people, for the people,” then there must be education of the people in the principles, practices, and commitmens of democracy.”*

Menurut Cho (2014: 710) ada tiga perkembangan yang secara spesifik perkembangan demokrasi itu yakni kualitas demokrasi elektoral, kualitas demokrasi liberal dan demokrasi *civic*. Demokrasi *civic* (*civic democracy*) menurutnya ialah ide tentang ideal akhir demokrasi yaitu pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Karena itu tambahnya, kualitas demokrasi *civic* menyisakan bagaimana pemerintah merespon kemauan dan kebutuhan rakyat. Ketika kebanyakan warga negara biasa menilai secara positif substansi demokrasi, sebuah demokrasi menjadi demokrasi *civic* yang tinggi.

Konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi)

Secara singkat konsepsi pendidikan kewarganegaraan itu perlu dibahas. Menurut Heater (2004: 1) Pendidikan kewarganegaraan (*Education for citienship*) di Yunani Kuno untuk mempersiapkan warga negara tahu bertindak dan memiliki kapasitas. Menurut Isin & Turner (2002: 1) Studi kewarganegaraan (*Citizenship studies*) mengambil fokus pada kondisi di mana

memungkinkan pengakuan atas hak-hak warga negara secara universal. Studi kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan memandang tidak semua orang mampu bertindak sehingga harus mendapatkan pendidikan politik lainnya di Yunani kuno.

Warga negara ideal adalah tujuan besar pendidikan kewarganegaraan. Warga negara ideal adalah warga yang memahami hak dan kewajibannya dalam sebuah komunitas. Kritik Janosky (2011: 5) bahwa masalah utama yang dituju teori kewarganegaraan yakni hak dan kewajiban tidaklah cukup secara mendasar; keseimbangan hak dan kewajiban secara total telah diabaikan dan pengembangan hak-hak dan kewajiban warga negara harus dirumuskan baik baik level makro dan mikro. Di sinilah pendidikan kewarganegaraan akan mencoba menjembatani antara harapan demokrasi antara kesenjangan warga negara.

Kewarganegaraan diharapkan tidak bersifat status keanggotaan belaka. Namun melekat di dalamnya peran dalam bentuk hak dan kewajiban seimbang yang harus dipenuhi individu. Starkey dan Osler (2006: 15) menegaskan bahwa kewarganegaraan itu lebih dari status. Hal itu lebih dari akitivitas politik advokasi juga termasuk dalam perasaan memiliki di mana yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap program pendidikan harus terlibat dengan budaya, identitas dan perasaan pembelajar.

Dalam Perspektif modern, Menurut David Kerr (1999: 11) pendidikan kewarganegaraan harus merespon perubahan global yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu: perubahan cepat manusia di dalam maupun diluar batas-batas nasional, peningkatan pengakuan hak penduduk asli dan minoritas, kegagalan struktur politik dan kelahiran bentuk baru, perubahan peran wanita di masyarakat, dampak ekonomi global dan pola kerja, efek revolusi informasi dan teknologi komunikasi, dan peningkatan populasi global dan penemuan bentuk baru komunitas, dan yang terakhir adalah kekurangan minat dan ketertarikan atau keterlibatan generasi muda di kehidupan publik dan politik. Pendidikan

kewarganegaraan juga menurut Menurut Tantengco, Nerissa S. & Evangeline L. Martin. (2017:1)) harus mengintegrasikan hak-hak asasi manusia dan pendidikan akan kedamaian. Oleh karena itu, Pendidikan kewarganegaraan sebagai cara untuk memadukan partikularistik dan universal, nasional dan internasional, dan individu dan masyarakat.

Konsepsi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri perlu untuk dikaji. Bentuk pendekatan dan pengajaran setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kultur, konten, dan budaya (Kerr,1999: 19). Terminologi yang sering didengar untuk menjelaskan pendidikan kewarganegaraan adalah *civic*, *citizenship education*, *social studies*. Sekalipun esensi dan tujuannya sama tetap memiliki perbedaan yang cukup penting.

Perbedaan antara *civic education* dengan *citizenship education* akan digambarkan sebagai berikut ini.

<i>Civic Education</i>	<i>Citizenship Education</i>
<i>Focus on political institutionally</i>	<i>Double focus: political institutionally and expansions of issues 'actual social problem.'"</i>
<i>Assigned to the last courses of secondary school</i>	<i>Present throughout to school sequence</i>
<i>Oriented towards the acquisition of knowledge-focus on content</i>	<i>Oriented towards the acquisition of knowledge, skills and attitudes.</i>

(Espinola,2005: 83)

Dari Pendekatan konseptualisasi, menurut Kerr (1999 :14) ada tiga yang sering digunakan dan memiliki kecenderungan tujuan diharapkan secara berbeda, yaitu:

a.

Pendidikan tentang kewarganegaraan (*Education about citizenship*) yaitu fokus pada penyiapan/penyediaan siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah

nasional dan struktur dan proses pemerintahan dan kehidupan politik.

b.

Pendidikan melalui kewarganegaraan (*Education through citizenship*) melibatkan siswa lewat belajar dengan melakukan, aktif dan pengalaman partisipatif di sekolah atau di dalam atau luar komunitas. Pembelajaran ini menguatkan komponen pengetahuan.

c.

Pendidikan untuk kewarganegaraan (*Education for citizenship*) mencakup dari dua sebelumnya dan menyiapkan peserta didik dengan rangkaiannya bahan seperti pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan sikap, nilai dan pendirian yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dan pantas dalam peran mereka dan bertanggungjawab dalam kehidupan mereka.

Menurut Brenson (1999: 7) komponen yang harus dipenuhi oleh warga negara sesuai dengan demokrasi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris (*civic skills*) dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Doganay (2012: 31) merinci dimensi pendidikan kewarganegaraan yang hendaknya diterapkan di sistem pendidikan. Dimensi-dimensi tersebut adalah pengetahuan (*knowledge*) yang terdiri dari pengetahuan politik, sosial, kultural, ekonomi dan bentuk-bentuk partisipasi. Dimensi selanjutnya adalah dimensi afektif yang terdiri dari nilai-nilai, sikap dan watak-watak. Dimensi terakhir adalah dimensi keterampilan yakni keterampilan umum dan keterampilan partisipasi. Ketiga komponen tersebut harus ada sehingga warga negara tersebut mampu bertindak otonom, bebas, sadar akan hak dan kewajibannya di dalam komunitas dimana kekuasaan dibentuk oleh hukum (Audigier,2002: 17).

Kelebihan dari konsep yang digagas Doganay adalah perincian komponen-komponen tersebut dengan lebih mendetail. Berikut adalah ruang lingkup dari setiap komponen yang disusun oleh Doganay.

P

Aspek Pengetahuan

<i>Pengetahuan Politik</i>	<i>Pengetahuan Sosial</i>
Politik dan sistem hukum Konsep dasar, prinsip dan institusi demokrasi Distribusi kekuasaan dan kewenangan melalui sejarah Konsep kewarganegaraan demokrasi Hak-hak warganegara dan pertanggung jawaban termasuk hak asasi manusia Pembuatan keputusan politik pada level lokal, nasional dan internasional Isu-isu politik utama berkembang Literasi media dan peran media secara personal dan kehidupan sosial Keamanan nasional dan internasional	Hubungan sosial Hak-hak sosial Fungsi dan tugas grup relawan dan masyarakat sipil Keragaman sosial (kesejahteraan, keamana sosial, kesehatan dan lainnya)
<i>Pengetahuan Budaya</i>	<i>Pengetahuan Ekonomi</i>
Sejarah dan warisan budaya yang dimiliki negara Keunggulan dari peran-peran dan nilai-nilai Perbedaan budaya tingkat lokal, regional, nasional dan konteks global	Hak-hak ekonomi Prinsip-prinsip ekonomi dan dampak perkembangan ekonomi Masalah pokok keuangan dan asosiasi literasi ekonomi Pembangunan berkelanjutan

Pelestarian lingkungan	secara lokal dan internasional
------------------------	--------------------------------

Aspek nilai, sikap dan Kepribadian

Nilai	Sikap	Kepribadian
Penerimaan negara hukum	Komitmen akan kebenaran	Tekad untuk berpartisipasi dalam komunitas politik
Hormat pada derajat manusia	Berpikir terbuka	Hasrat untuk aktif dalam komunitas
Hormat pada hak asasi manusia	Komitmen terhadap kedamaian dan solusi konstruktif atas masalah	Tekad untuk berpartisipasi dalam masyarakat
Keyakinan pada demokrasi	Perasaan yakin untuk terlibat dalam politik	
Keyakinan akan kedamaian	Mempercayai semua prinsip dalam demokrasi, lembaga dan prosedur sebagaimana pentingnya aksi sipil	
Keyakinan terhadap keadilan sosial, kesetaraan dan perlakuan sama akan warga negara	Bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatan sendiri	
Penolakan terhadap curiga, rasis dan semua bentuk diskriminasi	Berkomitmen terhadap saling memahami, kerja sama dan solidaritas	
Keyakinan akan solidaritas	Berkomitmen terhadap segala prinsip pembangunan berkelanjutan	
Hormat pada toleransi dan keberagaman	Perasaan akan memiliki	
Hormat pada penalaran		
Keyakinan terhadap pelestarian lingkungan		

Keyakinan terhadap pembangunan berkelanjutan		
Menjunjung kebebasan		
Menjunjung keadilan		

Ruang lingkup keterampilan

Keterampilan Umum	Keterampilan Partisipasi
Berpikir kritis	Memantau dan mempengaruhi politik dan segala keputusan termasuk terlibat dalam protes secara damai
Kritis menilai informasi	Penyelesaian konflik dengan jalur damai
Membedakan antara fakta dan opini	Berkontribusi secara sukarela-organisasi sipil sebagai anggota atau donatur
Mendapatkan keseimbangan penilaian, keputusan atau sudut pandang berdasarkan berpikir kritis atas informasi dan lewat penalaran	Membangun kerja sama dan koalisi
Bergantung pada penempatan posisi	Hidup dalam lingkungan multikultur
- Penyelesaian masalah	

<ul style="list-style-type: none"> - PPembuatan keputusan - KKreatifitas berpikir - KKeterampilan berkomunikasi - MPenggunakan media secara aktif 	<p>Memelihara segala bentuk keberagaman termasuk gender, sosial, budaya, ras dan agama</p> <p>Terlibat dalam perlindungan lingkungan</p> <p>Konsumsi secara etis dan menolak produk yang ilegal.</p>
---	--

Doganay berpendapat bahwa semua kurikulum pendidikan kewarganegaraan hendaknya mencakup pengetahuan, nilai, sikap, watak, dan keterampilan yang telah dijabarkan di atas. Semua hal di atas dibutuhkan di dalam masyarakat demokratis (Doganay, 2012: 36).

Dari beberapa pendapat yang dikomparasikan di atas jelas warga negara disyaratkan memiliki kemampuan, kapasitas, dan kualitas dalam banyak lingkup seperti budaya, ekonomi, politik dan lingkungan. Warga negara juga disyaratkan memiliki keterampilan berkomunikasi secara sosial, berpikiran terbuka, bertanggung jawab, dan membangun menempatkan diri dalam lingkungan serta membangun kerjasama dalam kehidupan publik. Gagasan warga negara ideal sesuai dengan konteks demokrasi menjadi arah yang dituju oleh setiap program pendidikan kewarganegaraan.

Warga Negara Ideal

Jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan terlepas beragam terminologi yang digunakan menuju penciptaan warga negara ideal. Warga negara yang dibahas bukanlah warga negara secara struktural yakni sebagai status. Namun yang Jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan terlepas beragam terminologi yang digunakan menuju penciptaan warga negara ideal. Warga negara yang dibahas bukanlah warga negara secara struktural yakni sebagai status. Namun

yang dikaji peran dari warga negara. Warga negara diharapkan mampu bertindak otonom, bebas, dan memahami nilai-nilai demokratis agar mampu mengambil keputusan keputusan, bertanggung jawab, dan dilandaskan penalaran (reasoning) terbuka serta logis.

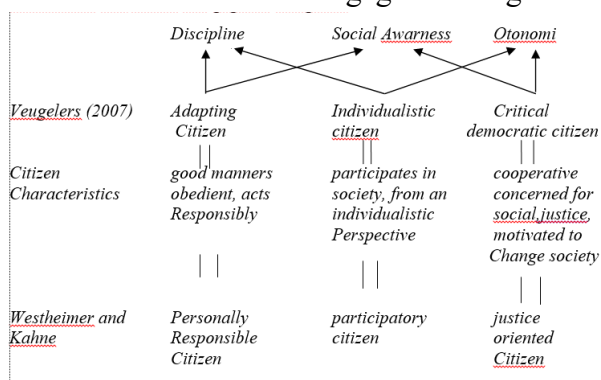
Telah dikemukakan gagasan tentang warga negara ideal oleh Westheimer dan Kahne (2004). Gagasan warga negara ideal ini menurut keduanya hanya bisa dibentuk lewat pendekatan, pedagogi serta kurikulum yang berbeda.

Deskripsi yang disusun yang termasuk ke dalam ketiga warga negara yang diharapkan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini (Westheimer dan Kahne, 2004: 240).

Warga negara bertanggung jawab secara pribadi	Warga negara partisipatif	Warga negara berorientasi keadilan
Bertanggung jawab dalam bertindak dalam komunitas Bekerja dan membayar pajak Mematuhi hukum Mendonorkan darah Sukarela membantu dalam krisis	Aktif dalam keanggotaan organisasi komunitas atau dalam usaha kreatif Menjalankan organisasi untuk peduli pada kebutuhan, promosi ekonomi berkelanjutan atau menghidupkan lingkungan Mengetahui bagaimana pemerintah bekerja	Secara kritis menilai struktur ekonomi, politik dan sosial melihat diluar penyebab permukaan Mencari dan membidik arena ketidakadilan Memahami pergerakan sosial demokrasi dan efek perubahan sistem

	Mengetahui strategi untuk menyelesaikan tugas bersama	
--	---	--

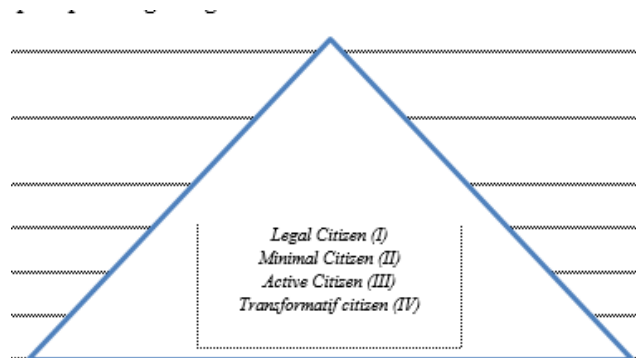
Banyak ahli mencoba memberikan gagasan mengklasifikasikan warga negara ideal demokrasi. Perbedaan diantara para ahli tetap menyimpan kesamaan yakni penekanan pentingnya peranan warga negara. Hal ini dirangkai oleh Johnson & Moris yang mencoba menghubungkan tipe kewarganegaraan Westheimer & Kahne dan gagasan Veugelers.



Johnson & Moris (2010: 85)

Johnson & Moris (2010: 85)

James. A Banks memiliki pandangan tipe-tipe warga negara ideal. Tipe-tipe ini didasarkan atas tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan publik atau politik. Berbeda dengan Kahne, Westheimer, dan Voulegers yang mengklasifikasi secara ketegoris berdasarkan komponen atau elemen pemnbentuknya, Banks lebih menekankan pada tingkat partisipasi individu. Dalam bentuk piramida, Bisa menebak warga negara ideal menurutnya harus ada di negara demokrasi. Berikut adalah ide Banks tentang tipe-tipe warga negara.



Banks (2008: 137).

Menurut Banks tipe I adalah warga yang tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tipe II adalah warga yang sudah aktif memberikan suara baik di tingkat lokal, regional maupun nasional dan isu-isu berkembang. Namun hanya

Menurut Banks tipe I adalah warga yang tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tipe II adalah warga yang sudah aktif memberikan suara baik di tingkat lokal, regional maupun nasional dan isu-isu berkembang. Namun hanya dalam bentuk pemberian suara semata. Tipe III adalah warga yang sudah aktif diluar dari sebatas pemberian suara namu juga aktif dalam dunia hukum dan isu lainnya. Tipe IV adalah warga negara yang aktif dalam penerapan nilai dan prinsip diluar kekuasaan biasa. Sehingga warga tipe ini dianggap mampu membawa transformasi dalam kehidupan sosial.

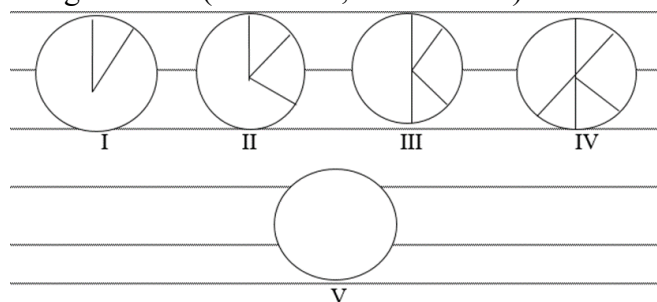
Tipe warga negara yang diharapkan oleh demokrasi adalah warga negara yang tidak hanya aktualisasi atau orientasi ke individu (Personally responsible; Kahne), (Adapting; Veulegers) melainkan warga yang mewujudkan prinsip, nilai, etika, budaya yang diyakini oleh ajaran demokrasi di kehidupan luas (Transformative; Banks, Justice oriented citizen; Kahne & Westheimer, dan Critical democratic citizen; Veulegers).

Menuju warga negara transformatif, berorientasi keadilan dan demokrasi kritis hanya bisa jika warga negara tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang cukup (Knowledge, skills and disposition; Brenson) ditambah aspek nilai, sikap dan

keterampilan baik secara umum dan berpartisipasi ala Johnson dan Moris.

Demokrasi memiliki nilai-nilai universal yang dimiliki setiap negara negara demokrasi. Sehingga ide tentang warga negara lebih luas, lintas batas nasional juga penting. Warga negara global semakin menarik seiring berkembangnya arus globalisasi (Murdiono,2018:21). Secara sederhana, gagasan warga negara digagas sebagai respon atas globalisasi yang mengarahkan manusia pada penyatuan.

Gerzon mendeskripsikan tingkatan kewarganegaraan yang saat ini berkembang di dunia menjadi 5 (lima) yaitu warga negara egosentris, ideosentris, sosiosentris, multisentris dan geosentris (Murdiono, 2018: 21-27).



Gerzon (2010) dalam Murdiono (2018: 21-27).

Tipe - I adalah yang disebut dengan egosentris. Tipe ini memandang sekitarnya dengan persepsi dibangun atas dirinya sendiri. Pemahamannya tentang dunia diambil dari persepsi pribadi. Tipe - II adalah yang disebut dengan ideosentris. Tipe ini sedikit meluas dari tipe I. Tipe ini menjadikan kelompok baik dalam bentuk partai, suku, dan lainnya sebagai tolok ukur cara pandangnya. Sekalipun meluas namun belum dianggap cukup untuk kehidupan global kekinian.

Tipe-III jauh lebih luas yakni disebut sosiosentris. Tolak yang digunakan adalah kelompok lebih besar yaitu bangsa. Dalam tipe ini memiliki loyalitas terhadap bangsa sendiri. Tipe-IV adalah tipe warga dunia yang memandang dunia secara terbuka dan pandangan budaya yang beragam. Tipe ini disebut multisentris. Kesadaran keberagaman baik suku, budaya dan agama serta lainnya diterima dalam

tipe ini. Namun kehidupan globalisasi nyatanya membutuhkan lebih.

Tipe-V adalah tipe yang kolosal, holistik, menyeluruh dan universal. Tipe ini disebut geosentris. Dalam tipe ini, warga negara telah melewati batas atau sekat-sekat yang biasanya menjadi identifikasi diri kemudian menarik diri dengan lainnya. Di sini pandangan yang dibangun adalah kemanusiaan universal, keluasan bumi dan kebaikan global.

Afirmasinya ada dorongan untuk ruang praksis individu yang lebih luas. Warga negara diharapkan tidak individualistik, personalistik, namun terbuka secara sosial suku, bangsa, keberagaman budaya hingga secara kolosal atas nama manusia dan dunia (geosentris). Hal ini ditekankan Gerzon (2010) bahwa sesungguhnya setiap individu seyogyanya bersifat global. Menurut Gerzon (2010: xv-xvii) ada 8 level identitas global-nya setiap individu yakni: (1) keturunan (gen), (2) tubuh atau fisik, (3) komunitas sosial, (4) ekonomi, (5) lingkungan, (6) kepemilikan, (7) politik dan (8) agama yang dianut.

Tipe warga negara yang diharapkan oleh demokrasi adalah warga negara yang tidak hanya aktualisasi atau orientasi Tipewarganegarayangdiharapkanolehdemokrasi adalah warga negara yang tidak hanya aktualisasi atau orientasi ke

Diskusi

Ada benang merah dan keterikatan kuat antara gejala dunia yang dikreasikan globalisasi dan kebutuhan warga negara berperan aktif. Warga negara bersifat transformatif ala Banks, berorientasi keadilan ala Westheimer dan Kahne, dan warga negara geosentris ala Hezron menjadi keniscayaan. Demokrasi intinya adalah pemberdayaan manusia memiliki makna bahwa demokrasi bisa berjalan ketika warga negara tersebut aktif, kreatif, transformatif.

Kemunduran demokrasi semakin mengkhawatirkan. Hal ini tergambarkan dalam publikasi UNDP 2014 sebanyak 55% dari warga tidak mendukung lagi demokrasi karena dianggap tidak mampu menyelesaikan

permasalahan ekonomi dan pada saat yang sama 56% memilih pembangunan ekonomi dari pada demokrasi itu sendiri (Espiona, 2005: 6). Menurut Issacharoff (2018: 485) demokrasi dianggap mengecewakan disebabkan oleh 4 (empat) faktor yakni kemunduran partai politik dan institusi lain, kegagalan lembaga legislatif, hilangnya kohesi sosial dan kemunduran kompetensi negara. Data UNDP dan pendapat Issacharof, dapat ditarik pemahaman bahwa permasalahan demokrasi terletak peranan aktif dari struktur demokrasi yakni individu kemudian institusi baik partai politik maupun komunitas kemudian berujung pada lemahnya kompetensi negara.

Tantangan antara dunia global dan nilai atau prinsip demokrasi seyogyanya kompatibel yakni mengafirmasikan urgensi warga negara yang transformatif, kritis dan berorientasi keadilan. Proyek ke depan adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan merespon tantangan dan problematika tersebut. Dalam ini, warga negara perlu dikembangkan dan dipersiapkan dengan pemahaman, keterampilan, dan watak yang mereka butuhkan untuk saling memahami dan berkomunikasi dengan individu lain yang datang dari berbagai latar belakang budaya beragam (Mellizo, 2018: 139).

Kajian pendidikan kewarganegaraan telah mengalami paradigma dalam merespon perubahan tersebut. Perubahan kajian kewarganegaraan telah beranjak dari sekadar definisi yang mengutamakan komponen hukum, sipil, politik ke komponen sosial seperti identitas, kebajikan, sikap *civic*, dan pengetahuan (Nabavi, 2010: 2). Menurut Boyte, *et.al* (2014: 206) bahwa gagasan tentang warga negara sebagai keanggotaan serta hal-hal yang berkaitannya sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Warga negara yang ideal adalah warga yang memiliki dua elemen yaitu spirit publik dan komitmen publik serta warga negara sebagai agen perubahan yang berbuat untuk perubahan.

Mempersiapkan generasi baru ideal membutuhkan kebijakan dan pendekatan. Mellizo (2018) berpendapat mengikuti konsepsi Banks bahwa pendekatan transformatif mampu

mempromosikan perkembangan sensitifitas lintas budaya sejak masa remaja. Menurutnya pendekatan ini lebih baik karena berbeda dengan pendekatan lain di mana penekanan akan loyalitas, komitmen dan kerjasama secara nasional. Sehingga tidak cukup dan hanya menekankan bentuk *status quo* dan kelas dominan kekuasaan kekuasaan di masyarakat. Pendekatan transformatif menekankan pada keterlibatan kritis dalam mengambil peran di komunitas, mendorong untuk mengenali masalah, mensyaratkan pengetahuan berkaitan dengan tempat tinggal mereka, komunitas budaya, bahasa, identitas, memperjelas nilai mereka baik secara individu maupun kolektif yang akan mengembangkan kehidupan manusia (Mellizo, 2018: 141). Upaya untuk menghasilkan warga negara aktif dan partisipatif menurut Kerr (1999: 29) juga mensyaratkan dialog partisipasi aktif banyak pihak mulai dari peneliti, guru, pembuat

SIMPULAN

Kajian kewarganegaraan yang terbatas dalam konteks keanggotaan seseorang individu tidak lagi relevan sekalipun penting. Kewarganegaraan abad modern diharuskan menciptakan dan mengembangkan kewarganegaraan dalam konteks peran baik di lingkungan keluarga, komunitas sosial dan negara. Hal ini seiring dengan masif dan terbukanya tantangan dunia termasuk semakin lemahnya keyakinan dan keberbikahan terhadap nilai-nilai demokrasi. Lebih penting lagi adalah bahwa esensi dari demokrasi itu sesungguhnya adalah keterlibatan aktif warga negara. Sehingga keluhuran dan kebaikan demokrasi bukanlah seberapa besar kebebasan dimiliki warga melainkan kualitas bagaimana warga negara bertindak dalam kebebasan. Banyak gagasan warga negara ideal yakni warga negara transformatif, kritis dan berorientasi keadilan. Warga negara ideal diharapkan tercipta dari pendidikan kewarganegaraan pada generasi muda dan remaja saat ini. Generasi muda atau siswa sejak sekarang diharuskan memiliki elemen atau komponen yaitu dimensi pengetahuan,

keterampilan, nilai dan watak. Untuk memenuhi elemen atau komponen tersebut maka dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan konsep citizenship dengan pendekatan kewarganegaraan untuk pendidikan (citizenship for education).

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Amy C & Christian Welzel. (2011), "Measuring Effective Democracy: The Human Empowerment Approach," *Comparative Politics*, 43(3), pp. 271-189.
- Arthur, James & Ian Davies & Carole Hahn. (2008). *Handbook of Education for Citizenship and Democracy*. California: Sage Publication.
- Audigier, Francois. (2000). *Project "Education for Democratic Citizenship" Basic Concepts and Core Competencies for Education for Democratic Citizenship*. Strasbourg: EDC.
- Bahmuller, Charles F & John J Patricikn (Ed). (1999) *Principles and Practices Education for Democratic Citizenship: International Perspective and Project*. Indiana: Indiana University.
- Banks, J.A. (2008), "Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in A Global Age," *Educational Researcher*. 37, (3), pp.129-139.
- Birzea. (2000). *Education for Democratic Citizenship: A Lifelong Learning Perspective*. Starsbourg: EDC.
- Boyte, et.al. (2014), "The New Civic Politics: Civic Theory and Practice for the Future," *The Good Society*. 23(2), pp.206-211.
- Branson, Margaret S. et.al. (1999). *Belajar Civic dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
- Center for Curriculum Redesign. (2015) *Skills for the 21st Century: What Should Students Learn?* Massachusetts: Montes Alti Educationa Foundation.
- Cho, Youngho. (2014), "Appraising the Quality of Democracy as a Developmental Phenomenon: How South Koreans Appraise The Quality of Their Democracy," *Social Indicators Research*. 116, (3), pp. 699- 712.
- Espinola, Viola (Ed). (2005). *Education for Citizenship and Democracy in Globalized World: A Comparative Perspective*. New York: Inter-American Development Bank Regional Policy Dialogue.
- Gerzon, Mark. (2010). *Global Citizen*. London: Rider.
- Heater, Derek. (2004). *A History of Education for Citizenship*. London: RoutledgeFalmer.
- Isin, Engin F & Bryan Turner (Ed). (2002). *Handbook of Citizenship Studies*. London: SAGE Publication.
- Issacharoff, Samuel. (2018), "Democracy's Deficit", *The University of Chicago Law Review*, 85(2), pp.485-520.
- Janosky, Thomas. (2011). *Civil Socieity and Citizenship*. California: SAGE Publication.
- Johnson, Laura & Paul Morris. (2010), "Towards A Framework for Critical Citizenship Education," *The Curriculum Journal*. 21(1), pp.77-96.
- Kerr, David. (1999), "Citizenship Education in The Curriculum: An International Review," *The School Field*. 10(3/4), pp.5-32.
- Mellizo, Jenifer M. (2018), "Transformative Citizenship Education and Intercultural Sensitivity in Early Adolescence," *World Journal of Education*. 8(3), pp.139-148.
- Murdiono, Mukhamad. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Global Membangun Kompetensi Global Warga Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nabavi, Maryam. (2010), "Constructing The 'Citizen' in Citizenship Education," *Canadian Journal for New Scholars in Education*. 3(1), pp.1-10.
- Ober, Josiah. (2012), "Democracy's Dignity," *The American Political Science Review*, 106(4), pp. 827-846.
- Osler, Audrey & Hugh Starkey. (2006), "Education for Democratic Cititenship: A Review of Research, Policy and

Practice 1995-2005," *Research Paper in Education*, 24 (1), pp.433-466.

Owen, "Democracy" in Bellamy, Richard & Andrew Mason (Ed). (2003). *Political Concept*. Manchester: Manchester University Press

